



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024

**Jl. P Mandurorejo No. 84 A Kajen 51161
Telp. (0285) 382 002 Fax (0285) 382 001**

KOMISI



KATA PENGANTAR

UMUM

LIHAN

UMUM

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran /Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Januari 2025
Sekretaris

Bambang Yusufianto, SE, M.Si
NIP. 19691202 199703 1 00



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan Penting Lainnya	31

KOMISI

**SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

PEMILIHAN UMUM

BHINEKA TUNGGAL IKA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**
Alamat : Jl. Mandurorejo No. 84 A – KAJEN 51161
Telp. (0285) 382002 Fax. (0285) 382001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kajen, 15 Januari 2025
Sekretaris

BAMBANG YUSMANTO, SE, M.Si
NIP. 19691202 199703 1 003





RINGKASAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode I Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 91.259.178.793 atau mencapai 94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 97.401.647.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 6.819.339.719 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 6.254.806.636 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 564.533.083 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 6.819.339.719

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 95.716.389.947 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 95.677.170.556 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0 dan sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 95.499.569.556

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Semester II tahun 2024 pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.590.682.188 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp 95.499.569.556 kemudian dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 96.728.227.087 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember adalah senilai Rp 6.819.339.719.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



LR A

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31
DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024		% thd Ang	DESEMBER
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0.00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0.00	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2,734,172,000	2,658,332,626	97	2,558,012,454
Belanja Barang	B.4	94,667,475,000	88,600,846,167	94	45,226,296,658
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	162,477,000
JUMLAH BELANJA		97,401,647,000	91,259,178,793	94	47,946,786,112



NERACA

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)		357,616,875	500,663,625
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	5,897,189,761	1,000,000,000
Persediaan	C.3	-	3,496,067,651
Jumlah Aset Lancar		6,254,806,636	4,996,731,276
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	2,370,702,550	2,391,034,050
Gedung dan Bangunan	C.5	97,718,000	97,718,000
Peralatan dan Mesin Belum Register	C.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(1,907,087,467)	(1,897,650,038)
Aset Tetap lainnya	C.8	3,200,000	3,200,000
Jumlah Aset Tetap		564,533,083	594,302,012
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.9	202,231,500	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(202,231,500)	
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		6,819,339,719	5,591,033,288
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	-	351,100
Uang Muka dari KPPN	C.12	-	-
Utang yang Belum Ditagihkan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	351,100
JUMLAH KEWAJIBAN		-	351,100
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.13	6,819,339,719	5,590,682,188



**LAPORAN
OPERASIONAL**

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.1	2,658,332,626	2,558,012,454
Beban Persediaan	D.2	5,884,823,702	-
Beban Barang dan Jasa	D.3	81,537,596,665	42,358,896,260
Beban Pemeliharaan	D.4	550,322,719	148,623,000
Beban Perjalanan Dinas	D.5	4,873,645,306	4,619,433,135
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat			
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	211,668,929	175,631,873
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(95,677,170,556)	46,860,596,722
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
JUMLAH PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		181,900,000	152,716
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		177,601,000	152,716
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya		4,299,000	-
Beban penyesuaian Nilai Persediaan		-	-
Kerugian Persediaan Rusak/Usang		-	-
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		177,601,000	152,716
SURPLUS/DEFISIT LO		(95,499,569,556)	(46,860,444,006)

KOMISI

LAPORAN

PERUBAHAN EKUITAS

P
M
I
L
I
H
A
N
U
M
U
M

BHINEKA TUNGGAL IKA

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31
DESEMBER 2023

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	5,590,682,188	517,240,385
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(95,499,569,556)	(46,860,444,006)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR		-	216,500
Lain-lain		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	216,500
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	96,728,227,087	51,933,669,309
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		1,228,657,531	5,073,441,803
EKUITAS AKHIR	E.5	6,819,339,719	5,590,682,188

KOMISI

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

PEMILIHAN

LIHAN

UMUM

BHINEKA TUNGGAL IKA

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum adalah meningkatnya Partisipasi dalam Pemilihan Tahun 2024, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang

berkelanjutan;

- e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

3. Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum



*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi

yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang

dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
-

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2024 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2024 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		
	Penerimaan Dalam Negeri	-	-
	a. Penerimaan Perpajakan		
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
	Pendapatan Lain-lain	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	-	-
B	Belanja		
	Belanja Pegawai	2,734,172,000	
	Belanja Barang	94,667,475,000	
	Belanja Modal	0	0
	Pembayaran Bunga Utang		
	Subsidi		
	Hibah		
	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	Belanja Lain-lain	-	-
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	97,401,647,000	0

Realisasi
Pendapatan
Rp 0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	-	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-	0.00
Jumlah	-	-	0.00

Realisasi Belanja
Negara
Rp
91.259.178.793

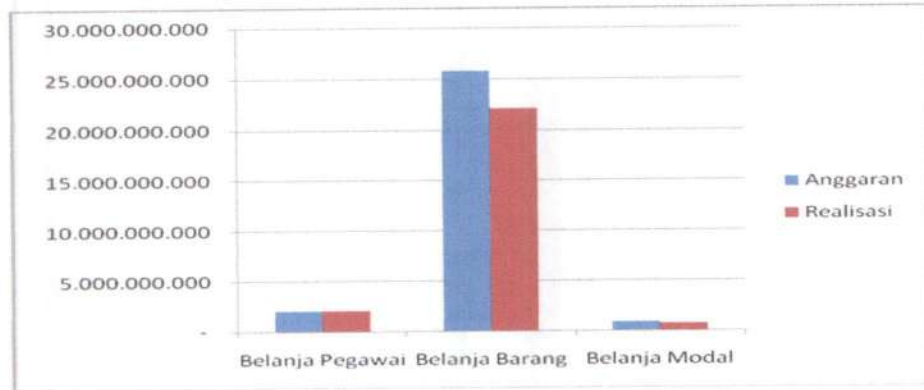
B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2024 adalah sebesar Rp 91.259.178.793 atau 90% dari anggaran belanja sebesar Rp 97.401.647.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2,734,172,000	2,658,332,626	97
Belanja Barang	94,667,475,000	88,600,846,167	94
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	97,401,647,000	91,259,178,793	94
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	97,401,647,000	91,259,178,793	94

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja Semester II TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 94% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024	Reaisasil 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Rupiah Murni dan Pinjaman dari Hibah			
Belanja Pegawai	2,658,332,626	2,558,012,454	4
Belanja Barang	88,600,846,167	45,226,296,658	96
Belanja Modal	-	162,477,000	-
Jumlah	91,259,178,793	47,946,786,112	90

Belanja Pegawai
Rp
2.658.332.626

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.658.332.626 dan Rp 2.558.012.454 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	Real 30 September 2024	Real 30 September 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,658,332,996		
Jumlah Belanja Kotor		0	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah Belanja	91,319,095,054	0	

Belanja Barang
Rp
88.600.846.167

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 88.600.846.167 Rp 45.226.296.658.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	Real 31 DESEMBER 2024	Real 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	12,266,353,787	319,338,700	3,741.17
Belanja Barang Non Operasional	51,691,408,800	1,852,810,800	2,689.89
Belanja Jasa	1,197,321,934	84,780,027	1,312.27
Belanja Pemeliharaan	550,332,719	68,072,350	708.45
Belanja Perjalanan	4,106,847,517	28,000,000	14,567.31
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,524,439,127	48,378,500	3,051.07
Jumlah Belanja Kotor	71,336,703,884	2,401,380,377	2,870.65
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	71,336,703,884	2,401,380,377	2,870.65

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal

Rp 0,-

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0,-

Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2024 dan 2023

URAIAN	Real 31 DESEMBER 2024	Real 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	0	0	0%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0%
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	0%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Di

Bendahara

Pengeluaran

Rp ,-

C.1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp ,- dan Rp 0'-

yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	31-Dec-24	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran		-
Jumlah		-

Persediaan

C.2 Persediaan

Rp 0,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 3.496.067.651,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Jenis	31-Dec-24	TH 2023
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Peralatan dan

C.3 Peralatan dan Mesin

Mesin

Rp 2.370.702.550

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 2.370.702.550,- dan Rp 2.391.034.050,-

Gedung dan

C.4 Gedung dan Bangunan

Bangunan

Rp 97.718.000,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp 97.718.000,- dan Rp 97.718.000,-. Tidak ada mutasi nilai Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan.

Gedung berupa gudang yang berdiri diatas tanah milik

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Sertifikat Tanah NIB : 11.31.08.17.01582 dengan luas tanah 1.538 m² terletak di Desa Tanjung Kulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, bukti kepemilikan bagian dari tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan tercatat dalam sertifikat hak Paten nomor : 03 tanggal 24 November tahun 2024.

Batas – Batas Tanah :

Sebelah Utara : Jl.Mandurorejo

Sebelah Selatan : Gedung SMA PGRI

Sebelah Timur : Gedung SMA PGRI

Sebelah barat : Tanah Milik Warga

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap*

Rp 1.907.087.467,-

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 1.907.087.467,- dan Rp 1.897.650.038,- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,370,702,550		
2	Gedung dan Bangunan	97,718,000		
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya	3,200,000		
	Akumulasi Penyusutan	1,907,087,467		0

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada

Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,-*

C.6 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari
KPPN Rp -*

C.7 Uang Muka Dari KPPN

Saldo uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp,- dan Rp 0,-. Akun ini merupakan penyeimbang kas di Bendahara Pengeluaran.

*Ekuitas
Rp
5.590.662.188,-*

C.8 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.590.662.188,- dan Rp 517.240.385,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Beban Pegawai
Rp 2.658.332.626,-*

D.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2.658.332.626,- dan Rp

2.558.012.454,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31-Dec-24	2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji		-	
			-
Jumlah	-	-	0.00%

D.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan Rp
5.884.823.702,-*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.884.823.702,- dan Rp 0,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa
81.537.596.665,-*

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 81.537.598.665,- dan Rp 42.358.896.260,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban

*Pemeliharaan Rp
550.322.719,-*

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 550.332.719,- dan Rp 148.623.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban

*Perjalanan Dinas
Rp
4.873.645.306,-*

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan dinas 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 4.873.645.306,- dan Rp 1.619.433.135,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melaksanakan misi KPU yaitu meningkatkan kualitas Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

Beban

*Penyusutan dan
Amortisasi*

Rp 211.668.929,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 211.668.929,- dan Rp 175.631.873,-.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat

alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional

Rp.177.601.000,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas balance dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31-Dec-24	2023	NAIK (TURUN) %
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan aset non lancar	0	0	0.00
Beban Pelepasan asetnon lancar	0	0	0.00
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	177,601,000		152,716
Pendapatan dari keg non operasional lainnya	181,900,000	0	152,716
Beban dari keg non operasional lainnya	4,299,000	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(177,601,000)	0	152,716

Ekuitas Awal Rp
5.590.682.188,-

Defisit LO
Rp
95.499.569.556,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.590.682.188,- dan Rp 517,240.385-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 95.499.569.556,- dan Rp 46.860.444.006,- Defisit LO

merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp 0,-*

E.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi pencatatan barang dari barang intrakomtable menjadi barang ekstrakomtable.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp
96,728,227,087,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar entitas merupakan selisih kenaikan/penurunan ekuitas dengan surplus/ defisit LO.

*Ekuitas Akhir Rp
6.819.339.719,-*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 6.819.339.719,- dan Rp 5.590.682.188,-

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan terjadi revisi DIPA sebagai berikut :

Daftar revisi DIPA

1. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2023 Tanggal 24 November 2023 (Dipa Awal)
2. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 30 Januari 2024 (Revisi 1)
3. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 30 Januari 2024 (Revisi 2)
4. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 13 Februari 2024 (Revisi 3)
5. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 19 Februari 2024 (Revisi 4)
6. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 7 Maret 2024 (Revisi 5)
7. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 1 April 2024 (Revisi 6)
8. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 21 April 2024 (Revisi 7)
9. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 27 Mei 2024 (Revisi 8)
10. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 3 Juni 2024 (Revisi 9)
11. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal 12 Juli 2024 (Revisi 10)

12. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
14 Juli 2024 (Revisi 11)
13. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
22 Juli 2024 (Revisi 12)
14. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
27 Agustus 2024 (Revisi 13)
15. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
19 September 2024 (Revisi 14)
16. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
4 Oktober 2024 (Revisi 15)
17. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
12 Oktober 2024 (Revisi 16)
18. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
12 Oktober 2024 (Revisi 17)
19. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
11 November 2024 (Revisi 18)
20. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
14 November 2024 (Revisi 19)
21. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
5 Desember 2024 (Revisi 20)
22. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
17 Desember 2024 (Revisi 21)
23. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
19 Desember 2024 (Revisi 22)
24. Nomor : SP.DIPA-076.01.2.657295/2024, Tanggal
27 Desember 2024 (Revisi 23)



LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:56 PM

Tgl Cetak : 04/02/25 4:57 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	39,219,391	0	39,219,391	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	39,219,391	0	39,219,391	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	39,219,391	0	39,219,391	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,658,332,626	2,558,012,454	100,320,172	3.922
Beban Persediaan	5,884,823,702	0	5,884,823,702	
Beban Barang dan Jasa	81,537,596,665	42,358,896,260	39,178,700,405	92.492
Beban Pemeliharaan	550,322,719	148,623,000	401,699,719	270.281
Beban Perjalanan Dinas	4,873,645,306	1,619,433,135	3,254,212,171	200.948
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:56 PM
Tgl Cetak : 04/02/25 4:57 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	211,668,929	175,631,873	36,037,056	20.519
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	95,716,389,947	46,860,596,722	48,855,793,225	104.258
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(95,677,170,556)	(46,860,596,722)	(48,816,573,834)	104.174
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	177,601,000	152,716	177,448,284	116,194 .953
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	181,900,000	152,716	181,747,284	119,009 .982
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,299,000	0	4,299,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	177,601,000	152,716	177,448,284	116,194 .953
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95,499,569,556)	(46,860,444,006)	(48,639,125,550)	103.796
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(95,499,569,556)	(46,860,444,006)	(48,639,125,550)	103.796

Keterangan :

FINAL

Kajen, 4 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO

NIP 196912021997031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:24 PM

Tgl Cetak : 04/02/25 5:00 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,590,682,188	517,240,385	5,073,441,803	980.87
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95,499,569,556)	(46,860,444,006)	(48,639,125,550)	103.8
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	216,500	(216,500)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	216,500	(216,500)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	96,728,227,087	51,933,669,309	44,794,557,778	86.25
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,228,657,531	5,073,441,803	(3,844,784,272)	(75.78)
EKUITAS AKHIR	6,819,339,719	5,590,682,188	1,228,657,531	21.98

Keterangan :

FINAL

Kajen, 4 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO

NIP 196912021997031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PEKALONGAN 657295

Tgl Data : 04/02/25 12:56 PM
Tgl Cetak : 04/02/25 5:01 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	97,401,647,000	91,259,178,793	(6,142,468,207)	94	49,430,040,000	47,946,786,112	1,483,253,888	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Kajen, 4 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG USMANTO
NIP 196912021997031003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:24 PM
Tgl Cetak : 04/02/25 5:01 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,897,189,761	1,000,000,000	4,897,189,761	489.72
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	357,616,875	500,663,625	(143,046,750)	(28.57)
Persediaan	0	3,496,067,651	(3,496,067,651)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	6,254,806,636	4,996,731,276	1,258,075,360	25.18
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	2,370,702,550	2,391,034,050	(20,331,500)	(0.85)
Gedung dan Bangunan	97,718,000	97,718,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	3,200,000	3,200,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,907,087,467)	(1,897,650,038)	(9,437,429)	0.50
JUMLAH ASET TETAP	564,533,083	594,302,012	(29,768,929)	(5.01)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	202,231,500	0	202,231,500	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(202,231,500)	0	(202,231,500)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	6,819,339,719	5,591,033,288	1,228,306,431	21.97
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	351,100	(351,100)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	351,100	(351,100)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN	0	351,100	(351,100)	(100.00)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,819,339,719	5,590,682,188	1,228,657,531	21.98
JUMLAH EKUITAS	6,819,339,719	5,590,682,188	1,228,657,531	21.98
JUMLAH EKUITAS	6,819,339,719	5,590,682,188	1,228,657,531	21.98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,819,339,719	5,591,033,288	1,228,306,431	21.97

Keterangan :

FINAL

Kajen, 4 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO

NIP 196912021997031003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:56 PM

Tgl Cetak : 04/02/25 5:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	5,897,189,761	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	357,616,875	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,370,702,550	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	97,718,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,200,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,887,543,862
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	19,543,605
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	202,231,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	202,231,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	64,694,950,554
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	39,219,391	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	611,077,924
0.0	391111	Ekuitas	0	5,590,682,188
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	31,461,418,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	34,293,391
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,926,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	181,900,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	758,818,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,376	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	57,629,760	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,601,656	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,340,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,930,413	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	38,527,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	107,582,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,425,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	759,432,081	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	15,956,800	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	125,188,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	99,355,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,928,893,987	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	48,153,880,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	19,798,405,294	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	74,873,023	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,128,961	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,559,850	0
3.0	522141	Beban Sewa	143,046,750	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:56 PM
Tgl Cetak : 04/02/25 5:02 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	75,900,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,113,409,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	452,393,719	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97,929,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	766,797,789	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	148,996,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,537,528,800	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	420,322,717	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	209,063,115	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,605,814	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	5,884,823,702	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	4,299,000	0
JUMLAH			104,688,567,024	104,688,567,024

Keterangan :
FINAL

Kajen, 4 Februari 2025
Peranggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (657295) KPU KABUPATEN PEKALONGAN

Tgl Data : 04/02/25 12:24 PM

Tgl Cetak : 04/02/25 5:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	91,259,178,793
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	39,219,391	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	34,293,391
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,926,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	758,818,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,746	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,629,760	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,601,656	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,340,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,930,413	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	38,527,440	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	107,582,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,425,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	759,432,081	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	15,956,800	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	125,188,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	99,355,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	12,025,853,987	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	48,153,880,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,979,267,294	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,524,439,127	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	74,873,023	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	2,128,961	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,910,950	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	75,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,113,409,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	452,393,719	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97,929,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	767,210,289	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	148,996,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,537,528,800	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	420,322,717	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	370
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	20,284,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	412,500
JUMLAH			91,319,095,054	91,319,095,054

Keterangan :
FINAL

Kajen, 4 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS



BAMBANG YUSMANTO
196912021997031003